

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Transportasi merupakan hal penting dalam kehidupan atau kegiatan manusia dan juga merupakan unsur terpenting dalam mobilitas manusia dan barang sehari-hari. Dari dahulu transportasi telah menjadi alternatif yang digunakan masyarakat sebagai salah bentuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat. Sistem transportasi yang ada dapat membantu meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Keberadaan transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Dengan demikian pengelolaan parkir sangat diperlukan untuk wilayah Kota Pangkalpinang khususnya yang berada di area Ramayana dan BTC. Berikut bentuk-bentuk yang dikelola oleh pemerintah dan masyarakatnya sendiri :

Pertama, berupa peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai peraturan tentang penataan angkutan umum dan parkir. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pangkalpinang ini seyogyanya digunakan untuk memperbaiki pengelolaan, hal ini bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan angkutan umum dan parkir yang berada di kawasan Ramayana dan BTC Kota Pangkalpinang. Kebijakan pemerintah ini ditetapkan agar dapat mengatasi permasalahan terkait penataan dan mengurangi masalah kemacetan dan kenyamanan masyarakat ketika

berada di kawasan tersebut. *Kedua*, pemerintah juga melakukan sosialisasi terkait akan peraturan yang harus ditaati oleh pihak terkait. Hal ini bertujuan agar para supir angkutan umum dan juru parkir dapat mengetahui peraturan yang ada dan menjalankannya dengan baik. *Ketiga*, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada kedua belah pihak yang didapati melanggar peraturan. *Keempat*, pemerintah melakukan *controlling* agar mengurangi tingkat pelanggaran oleh para supir angkutan umum dan juru parkir.

Sebelum berdirinya BTC pada tahun 2010 tepatnya pada bulan agustus, kawasan BTC ini dahulunya merupakan terminal besar tempat berhentinya bus-bus maupun angkutan umum dalam melakukan pemberhentian penumpang terkait trayek antar desa menuju kota maupun dari kota ke desa. Bukan hanya terminal besar saja yang berada di kawasan tersebut, pusat perbelanjaan yang biasa disebut dengan pasar besar dahulunya berada di kawasan BTC ini. BTC merupakan salah satu penyebab terjadinya perubahan dalam sistem pengelolaan angkutan umum dan parkir yang dimana dahulu pasar besar sebelum adanya BTC, Dalam sebuah pengelolaan selalu terdapat berbagai macam persoalan yang bermunculan. Hal ini harus ditangani seoptimal mungkin agar tidak terjadi kekacauan di kemudian hari, seperti proses pengelolaan angkutan umum beserta parkir. Perbaikan selalu dilakukan ketika terjadi masalah didalam peraturan yang telah dibuat dan ditetapkan. Dalam penelitian dilapangan terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan angkutan umum dan parkir di kawasan Ramayana dan BTC yaitu:

1. Faktor pendukung dalam proses pengelolaan angkutan umum dan parkir meliputi ketersediaan angkutan umum sebagai bentuk penyediaan layanan jasa publik, ketersediaan area parkir, adanya aturan pengelolaan parkir sebagai cara untuk menata dan mengatur setiap proses parkir.
2. Faktor penghambat pengelolaan angkutan umum dan parkir meliputi rendahnya kesadaran pengemudi angkutan umum dimana terdapat banyak keluhan dari masyarakat serta pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak memperhatikan akan keselamatan pengguna jasa angkutan umum, rendahnya tingkat sosialisasi dari pemerintah dimana sosialisasi tidak sepenuhnya diterima oleh para angkutan umum dan parkir, keterbatasan area parkir minim yang dimana area parkir menggunakan tepi jalan raya dan juga terkadang melewati batas yang telah ditentukan sehingga mengganggu aktifitas para pengguna jalan, serta munculnya konflik kepentingan dimana terjadi pembangkangan akan sebuah aturan akibat adanya konflik kepentingan dari pihak pemerintah maupun dari para supir angkutan umum dan juru parkir.

B. Implikasi Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori segitiga John Galtung tiga dimensi segitiga konflik dalam menganalisis terciptanya sebuah konflik. Adapun tiga dimensi didalam segitiga konflik Galtung, yaitu sikap, perilaku, dan kontradisi. Dalam pengelolaan angkutan umum dan parkir di kawasan Ramayana dan BTC pasti akan melahirkan sebuah konflik diantara kedua belah pihak. Peneliti melihat bagaimana sikap yang dimunculkan dari para supir angkutan umum dan para petugas parkir. Kemudian memunculkan perilaku yang dapat

berupa kerjasama, persaingan, atau paksaan, atau suatu gerak tangan dan tubuh yang menunjukkan persahabatan atau permusuhan antar kedua belah pihak baik para angkutan umum dan petugas parkir dengan aparat pemerintah (LLAJ)

Keterkaitan dengan penelitian ini adalah dimana dari kedua kelompok kepentingan yaitu pihak pemerintah serta supir angkutan umum dan parkir yang akan berdampak pada terciptanya konflik. Mengapa demikian karena dimana setiap pihak selalu mempertahankan kepentingan mereka seperti dari hasil observasi dan fakta dilapangan bahwa dimana pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Masih terdapat petugas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai tempat parkir kendaraan lebih dari satu lapis. Hal ini dilakukan oleh pihak juru parkir motor yang menggunakan tepi jalan sebagai tempat parkir lebih dari satu baris hal ini juga memicu akan kemacetan lalu lintas di kawasan Ramayana dan BTC. Tidak hanya juru parkir, para supir angkutan umum juga berhenti di sembarang tempat dan menimbulkan kemacetan. Hal ini menjadi faktor penghambat bagi pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah. Disisi lain kelompok pemerintah ingin menertibkan para supir angkutan umum serta juru parkir.

C. Saran

Dalam penertiban angkutan umum dan parkir yang telah dilakukan, itu semua merupakan daya dan upaya untuk melakukan penetapan aturan yang harus dapat diterima dan dapat berlaku baik untuk semua kalangan terkhususnya para angkutan umum dan parkir. Dalam hal tersebut perlu adanya himbawan untuk kepada semua kalangan masyarakat Kota Pangkalpinang yaitu:

1. Pemerintah

Pemerintah harus lebih tegas dalam penyampaian peraturan serta sanksi-sanksi yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki lalulintas dan pengguna jalan sehingga tidak timbul keresahan bagi masyarakat.

2. Supir angkutan umum dan parker

Kepada para supir angkutan umum dan parkir haruslah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar tidak menimbulkan masalah-masalah dikemudian hari. Jika peraturan tersebut tidak merugikan pihak angkutan umum dan parkir, maka dijalankan sebaik mungkin untuk memperbaiki masalah lalulintas.

3. Masyarakat

Kepada masyarakat khususnya menjadi pengawas ketika menggunakan jasa parkir dan angkutan umum dikarenakan masyarakat pengguna jasa lebih merasakan layanan yang diberikan, jika terjadi pelanggaran untuk melapor kepada pihak pemerintah agar dapat di atasi dan ditangani secepat mungkin dan juga agar tidak membuat masyarakat yang lain resah.